

Volume 13, Nomor 2, Desember 2010

ISSN 1410-7406

# ***al-‘Adâlah***

**Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan**

**Istidlal al-Taqshidi: Formula Baru Pembaruan Fiqh  
(Analisis Pemikiran Muhammad Ibn ‘Asyur)**  
Sri Lum’atus Sa’adah

**Induksi Tematis Imam Asy-Syatibi:  
Kepastian dalam Hukum Islam**  
Muhammad Faisol

**Konstruksi Fiqh Bukhari dalam al-Jami’ al-Shahih  
(Menenal Sisi Lain Pemikiran Imam Bukhari)**  
H. Abdul Sattar

**Fatwa dan Urgensinya  
dalam Pengembangan Hukum Islam**  
Muhaimin

**Charles J. Adams  
dan Tradisi Kajian Keagamaan dalam Islam**  
Abdul Rokhim

STAIN JEMBER PRESS

ISSN 1410-7406

**al-'Adālah**

*Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*  
Volume 13 Nomor 2, Desember 2010  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember

---

**Ketua Dewan Editor**

Ahmadiono

**Sekretaris Dewan Editor**

Muhaimin

**Editor Ahli**

H. Moh. Khusnuridlo (STAIN Jember)  
Thoha Hamim (IAIN Sunan Ampel Surabaya)  
Nur Syam (IAIN Sunan Ampel Surabaya)  
Kacung Maridjan (Unair Surabaya)  
M. Zainuddin (UIN Malang)  
Muniron (STAIN Jember)  
H. Sofyan Tsauri (STAIN Jember)

**Editor Pelaksana**

Saifuddin  
Khoirul Faizin  
H. Nur Solikin  
Hafidz

**Staf Redaksi**

Hesti Widyopalupi  
Laili Efendy

**Alamat Redaksi**

Jl. Jumat 94 Mangli Jember  
Telp. 0331-487550 Fax. 0331-427005 E-mail: aulann@yahoo.co.id

---

**al-'Adālah** merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun, setiap bulan Juni dan Desember. Diterbitkan oleh STAIN Jember Press, dimaksudkan sebagai wahana pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, agamawan, intelektual, dan mahasiswa) dengan keislaman dan kemasyarakatan sebagai ranah kajian

## DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi, iii  
Editorial, iv

### **Artikel Utama**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Sri Lum'atus Sa'adah | Istidlal Al-Taqshidi: Formula Baru Pembaruan Fiqh (Analisis Pemikiran Muhammad Ibn 'Asyur), 191-204          |
| Muhammad Faisol      | Induksi Tematis Asy-Syatibi: Kepastian Dalam Hukum Islam, 205-214  |
| H. Abdul Sattar      | Konstruksi Fiqh Bukhari Dalam <i>Al-Jamir' Al-Shahib</i> (Menenal Sisi Lain Pemikiran Imam Bukhari), 215-230 |
| Muhaimin             | Fatwa Dan Urgensinya Dalam Pengembangan Hukum Islam, 231-244   |

### **Artikel Bebas**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Ragwan Albaar     | Pragmatisme Dalam Filsafat Kontemporer (Pembacaan Atas Pemikiran Charles S. Peirce), 245-256 |
| Abdul Rokhim      | Charles J. Adams Dan Tradisi Kajian Keagamaan Dalam Islam, 257-270                           |
| M. Masrur         | Kyai Sholeh Darat, Tafsir Faid Al-Rahman Dan Ra. Kartini, 271-286                            |
| Siti Rodliyah     | Perspektif Islam Atas Kepribadian Pemimpin Perempuan, 287-296                                |
| M. Akmasyah       | Universalitas Hak Asasi Manusia (Anrara Teosentris Dan Antroposentris), 297-310              |
| Syamsun Ni'am     | Mengurai Radikalisasi Agama Di Indonesia Dan Solusi Yang Ditawarkan, 311-320                 |
| Tirin Nurhidayati | Membangun Karakter Anak Melalui Pendidikan Nilai, 321-335                                    |

## UNIVERSALITAS HAK ASASI MANUSIA (Antara Teosentris dan Antroposentris)

**M. Akmansyah**

IAIN Raden Intan Lampung

Jl. Dr. Soetomo No. 26 Bandar Lampung

m\_akhmansyah@yahoo.co.id

### **Abstrak**

*Diskursus hak asasi manusia, sejauh ini, masih dalam perdebatan. Terdapat perbedaan fundamental antara konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan perspektif barat. Islam, menurut pandangan teosentris, terdiri atas aspek ketuhanan dan kehidupan manusia yang orientasinya sebagai penyembah tuhan. Sebaliknya, di Barat, segala sesuatunya mesti diharmonisasi dengan eksistensi manusia, sehingga karakter mengarah pada pemenuhan kebutuhan individu manusia – anthropocentric. Perbedaan persepsi akan hak asasi manusia menjadi salah satu alasan yang mendorong adanya konflik antara Islam dan Barat. Artikel ini berupaya untuk merekonsiliasi adanya dua kontradiksi tersebut. Setidaknya, pembangunan kultur masyarakat yang lebih terbuka, sedianya dapat dikembangkan di masa yang akan datang.*

### **Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Antroposentris dan Teosentris**

### **Pendahuluan**

Hak-Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan sering disingkat dengan HAM), di manapun tempatnya, akan selalu ada dan terus diperjuangkan. Naluri manusia tidak mungkin dapat menerima setiap kezaliman, penindasan, dan perampasan hak-hak asasi seseorang terjadi di hadapannya. Karenanya, setiap perjuangan agar terhindar dari pelanggaran hak-hak tersebut, adalah keniscayaan. Hingga kini, diskursus HAM memang belum usai diperdebatkan. Satu pihak mengklaim, HAM hendaknya dilaksanakan secara seragam dan menyeluruh di berbagai penjuru dunia (*universal approaches*). Sementara yang lain, menghendaki penegakan HAM dari sudut pandang yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi budaya dan keyakinan masyarakat setempat (*local approaches*).

Hingga saat ini, belum ada solusi yang lebih memadai bagi kedua kutub tersebut. Bahkan yang terjadi sebaliknya, setiap upaya dari pihak yang terakhir di atas selalu dicurigai sebagai pembangkangan atas sesuatu yang universal. Di sisi lain, pada kenyataannya, ada yang berpendapat bahwa ada HAM yang diberlakukan secara khusus. Dalam menanggapi, orang mungkin akan bertanya: “Bukankah muslim dan non muslim sama-sama manusia?” “Dapatkah sebuah daftar HAM layak dibatasi untuk sebuah komunitas religius saja?” “Apakah, misalnya HAM dalam Hindu, Yahudi, Kristen dan HAM lainnya berbeda dari HAM dalam Islam?”. Dengan demikian, meskipun HAM yang bersifat universal itu, sekuler dalam sifatnya



dan dalam penerapannya? Berdasarkan kenyataan di muka, maka artikel singkat ini akan membahas ide dasar menuju HAM universal.

### Hak Asasi Manusia: Perspektif Barat

Eggi Sujana berpendapat bahwa istilah HAM sering dinamai dengan hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir.<sup>1</sup> Menurut M. Timur, kata "hak" didefinisikan dalam berbagai kamus sebagai "tuntutan yang pantas". Bagaimanapun, pendefinisian semacam ini tidak memecahkan persoalan HAM karena kata "pantas" tetap tidak didefinisikan dan atas dasar definisi semacam ini, tidak mungkin menentukan HAM. Menurutnya, definisi yang lebih baik tentang "hak" adalah bahwa ia merupakan suatu "nilai" yang diinginkan seseorang untuk melindungi dirinya, agar ia dapat memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan mengembangkan kepribadiannya.<sup>2</sup>

Istilah-istilah yang dikenal di Barat mengenai HAM itu sebelumnya ialah "*right of man*"; yang menggantikan istilah "*natural right*" yang dipergunakan secara luas pada masa pencerahan (*enlightenment*). Ketika Nyonya Eleanor Roosevelt melaksanakan tugasnya sebagai *co-Chairperson United Nation Commission on Human Right*, ia menemukan bahwa istilah "*fight of man*" dalam berbagai dokumen itu tidak secara otomatis dipahami sebagai pengertian yang mencakup "*right of women*" di berbagai belahan dunia.

Oleh karena itu, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui berlakunya suatu pernyataan umum yang mengatur masalah HAM, istilah yang kemudian dipergunakan ialah "Hak-Hak Asasi Manusia" (*human rights*), yang dianggap lebih bersifat netral dan universal daripada istilah "*right of man*". Pernyataan inipun kemudian disebut sebagai "*Universal Declaration of Human Rights*".

Jauh sebelum abad ke-17 dan ke-18 Masehi, telah dikenal berbagai aturan yang mengatur tentang HAM. *The Hammurabi Codes of Babylon*<sup>3</sup> misalnya, adalah indikasi yang membenarkan, bahwa dalam masyarakat Barat telah mulai tumbuh kesadaran akan harkat dan martabat dirinya, sehingga Kode Hammurabi sengaja diundangkan untuk memberantas yang congkak dan murka serta membawa keadilan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Widjaja menegaskan sejarah HAM baru berkembang di Inggris dan sejak revolusi Perancis.<sup>5</sup> Majid Ali Khan lebih rinci menyebutkan, bahwa hak-hak tersebut

<sup>1</sup>Eggi Sujana, *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki* (Jakarta: Nuansa Madani, 2000), 3-4

<sup>2</sup>Lihat M. Timur, "Sebuah dialog tentang Islam dan Hak-hak Asasi Manusia", dalam Harun Nasution dan Bahiar Effendy (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), 76

<sup>3</sup>Hammurabi adalah raja Babylonia yang berkuasa tahun 1792-1750 SM. Untuk keterangan lebih dapat dilihat di <http://www.udhr50.org/history/overview.html>

<sup>4</sup>Beny Herman K., "Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar", dalam Paul S. Baut dan Benny Herman, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan LBHI, 1988), 3

<sup>5</sup>H. A. W. Widjaja, *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia* (Jakarta: Rinca Cipta,

berasal dari “*domestic legislation*”.<sup>6</sup> Legeslasi lokal tersebut, di antaranya seperti dijelaskan, “Great precedents in the recognition and protection of specific human rights lie in such documents as *the British Magna Carta, the United States Bill of Rights, and the French Declaration of the Rights of Man*.”<sup>7</sup>

Lopa berpendapat, mayoritas para pakar di Eropa beranggapan lahirnya HAM dimulai saat lahirnya Magna Carta (1215).<sup>8</sup> Magna Carta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya mempunyai kekuasaan yang absolut, menjadi terbatas dan dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Dari sini lahir doktrin “raja tidak kebal hukum”.<sup>9</sup> Pasal 21 Magna Charta menggariskan, “Earls and barons shall not be amerced except through their peers, and only in accordance with the degree of the offense.”<sup>10</sup> Begitu juga dengan pasal 40, “To no one will we sell, to no one will we refuse or delay, right or justice.”<sup>11</sup>

Lahirnya Magna Carta kemudian diikuti oleh peraturan sejenis yang lebih dikenal dengan “*Bill of Right*” tahun 1689. Saat itu timbul adagium “equality before the law”. Adagium inilah yang akhirnya mendorong timbulnya negara hukum dan demokratis. Para pejuang HAM dahulu sudah bertekad bahwa hak persamaan harus diwujudkan, betapapun beratnya resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan.<sup>12</sup>

Herman berpandangan bahwa gerakan emansipatorik dan revolusi kemanusiaan yang terjadi di Inggris menjadi sumber inspirasi timbulnya gerakan revolusioner di Amerika dan Perancis. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*American Declaration of Independence*) pada 4 Juli 1776 yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan serta keharusan menggantikan pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.<sup>13</sup>

Sebagai imbas dari revolusi Amerika, timbul revolusi Perancis tahun 1789.<sup>14</sup> Pada tahun ini, di Perancis dicetuskan “*Declaration des droits de l’homme et du citoyen*”, sebuah deklarasi yang menjamin persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat

2000), 74

<sup>6</sup>Majid Ali Khan, “The Universal Declaration of Human Rights and the Human Rights in Islam A Comparative Study,” dalam Tahir Mahmood (ed), *Human Rights in Islamic Law* (New Delhi: Genuine Publications Pvt. Ltd., 1993), 65

<sup>7</sup>Lihat Basis of Human Rights, <http://www.udhr50.org/history/overview.html>

<sup>8</sup>Baharuddin Lopa, *al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1999), 2

<sup>9</sup>Lihat *The Encyclopedia Americana: International Edition* (New York: Americana Cooperation, 1972), 123

<sup>10</sup>Ibid., 123; Lihat juga, The Magna Carta, <http://www.hrweb.org>

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Lopa, *al-Qur'an*, 3

<sup>13</sup><http://www.leftjustified.Org/leftjust/lib/sc/ht/decl/home.map>

<sup>14</sup>Dengan moto “Freedom, Equality, dan Fraternity,” Lihat [http://www.france\\*nobel-online.com](http://www.france*nobel-online.com)

dan martabat kemanusiaan. Tiuk beratnya pada lima hak asasi, yaitu: kepemilikan harta (*propiete*), kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), keamanan (*securite*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistance a l'oppression*).<sup>15</sup>

Pada kurun waktu yang hampir bersamaan, di Amerika disahkan sebuah Undang-Undang Hak (*The Bill of Rights*) yang kemudian menjadi bagian konstitusi Amerika pada tahun 1791. *Bill of Rights* umumnya berisi jaminan hak individu dan batasan bagi pemerintah *federal* dan *state*, sebagaimana disebutkan, "They are a collection of guarantees of individual rights and of limitations on federal and state governments, which derived from popular dissatisfaction with the limited guarantees of the Constitution".<sup>16</sup>

Menurut Patwari, instrumen-instrumen di atas merupakan instrumen-instrumen penting di mana beberapa HAM dilindungi. Paul Sieghart menyimpulkan muatan instrumen-instrumen tersebut menjadi tiga konsep penting yang berkaitan dengan HAM dan kebebasan fundamental: (1) *principle of inalienability*, (2) *principle of inviolability*, and (3) *doctrine of rule of law*.<sup>17</sup>

Perkembangan HAM di Eropa dan Amerika Serikat tersebut, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pemikiran terutama pada abad ke-17 dan 18, antara lain: lahir teori Rousseau (*social contract*), Montequieu dengan Trias Politikanya yang mengajarkan penisahan kekuasaan guna mencegah tirani, John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya.<sup>18</sup> Menurut Widjaja, perumusan hak asasi pada abad ke-17 dan 18 pada umumnya masih terbatas pada hak-hak yang bersifat politis, seperti persamaan hak, hak atas kebebasan, dan hak pilih.<sup>19</sup>

Apabila pemikiran tentang HAM pada abad ke-17 dan 18 di atas, hanya dalam bidang politik, maka pada abad ke-20 sudah mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya.<sup>20</sup> Pada abad ke-20 terdapat suatu tonggak sejarah yang tidak dapat dilewatkan begitu saja, yaitu pencaangan empat macam hak yang kemudian dikenal dengan "*The four Freedoms*"<sup>21</sup> yang dikemukakan Franklin D. Roosevelt, 6 Januari 1941: (1) *freedom of speech and expression*, (2) *freedom of every person to worship God in his own way*, (3) *freedom from want*, dan (4) *freedom from fear*.

<sup>15</sup>The French Declaration lebih merinci hak-hak asasi, sehingga melahirkan dasar the rule of law. Misalnya, tidak boleh ditangkap dengan semena-mena, tidak diperkenankan menangkap orang tanpa alasan yang sah dan dirahan tanpa surat perintah. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), kebebasan mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), dan pengaturan hak milik (*the right to property*) dan hak dasar lainnya. Jadi dalam French Declaration sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum. Lihat; Lopa, *al-Qur'an*, 3-4

<sup>16</sup>Lihat; <http://education.Yahoo.com/reference/encyclopedia/Index.html>

<sup>17</sup>Paul Sieghart, *The International Law of Human Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1984), 8

<sup>18</sup>Ibid

<sup>19</sup>Widjaja, *Penerapan Nilai-nilai*, 65

<sup>20</sup>Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), 121

<sup>21</sup>Ibid, 5

Menurut Setiardja, pidato Roosevelt menjadi terkenal karena keempat macam kebebasan itu. Terutama freedom from want, kebebasan dari kekurangan dan dari kemiskinan, sangat menarik perhatian saat itu. Kebebasan dari kekurangan ini diletakkan di samping kebebasan-kebebasan HAM lainnya.<sup>22</sup> Pidato tersebut mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap Deklarasi Universal HAM.

Lopa menjelaskan bahwa semua hak-hak ini sesudah perang dunia II (sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal.<sup>23</sup> Pada tahun 1946 PBB mendirikan komisi HAM (*Commission on Human Rights*)<sup>24</sup> yang menetapkan secara terperinci hak politik ditambah hak-hak ekonomi dan sosial. Pada tanggal 10 Desember 1948 *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau yang juga dikenal dengan Deklarasi HAM Universal,<sup>25</sup> diterima tanpa penolakan oleh negara-negara yang bergabung dalam PBB, walaupun dengan lima negara, termasuk Uni Sovyet, waktu itu abstain.<sup>26</sup> Meskipun demikian, dalam perjalanannya, deklarasi HAM ini tidak mudah untuk diterima dan dilaksanakan.

Deklarasi HAM Universal terdiri dari pasal-pasal yang sarat dengan hak-hak sipil dan politik berdasarkan prinsip kebebasan dan ditujukan pada eksistensi insan pribadi dan kemungkinan perkembangannya. Secara lebih spesifik konsep hak pertama ini lebih bernuansa hukum, antara lain mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, dan lain-lain. Deklarasi ini disebut sebagai Generasi I HAM.<sup>27</sup>

Pada awal tahun 1960-an ada upaya dari komisi hak asasi PBB untuk merekonseptualisasi dan mereaktualisasi HAM dan dalam upaya ini, hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya mendapat porsi perhatian yang lebih besar. Pada tahun 1966,<sup>28</sup> upaya rekonseptualisasi HAM itu mencapai puncaknya, ketika sidang umum PBB 16 Desember 1966 mengesahkan tiga bentuk perjanjian: (1) *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights*, dan (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta (3) *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Politic Rights*, sebuah protokol tambahan yang mengatur tentang hak-hak sipil dan politik.

Dua kovenan inilah yang menjadi dokumen dasar generasi II konsepsi dasar HAM sebagai babak baru dalam perkembangan HAM. Titik tekan generasi II adalah pada HAM dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya—sebagai reaksi terhadap

---

<sup>22</sup>A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 88.

<sup>23</sup>Lopa, *al-Qur'an*, 4.

<sup>24</sup>Budiardjo, *Dasar-dasar*, 122.

<sup>25</sup>Jawahir Thontawi, *HAM dalam Hukum Internasional dan Prospeknya dalam Kabinet Persatuan Nasional*, Jurnal Magister Hukum Vol. II No. 1 Pebruari 2000, 27.

<sup>26</sup>Maurice Cranston, *Human Rights Today* (Bombay: Manaktana & Sons, 1962), 38.

<sup>27</sup>Herman, *Hak Asasi Manusia*, 10.

<sup>28</sup>Ibid, 12.



konsep dasar Generasi yang lebih menekankan bidang politik dan yuridis.

Kedua konsep di atas, kemudian disatukan dan diramu menjadi konsep baru yang lebih luas dan secara akomodatif mencakup isi dan ruang lingkup konsep dasar Generasi I dan Generasi II HAM yang dalam pembabakan sejarah perkembangan HAM disebut "*The Rights to Developments*"—hak-hak atas pembangunan dan inilah yang merupakan Generasi III HAM.<sup>29</sup>

Deklarasi dimaksud di muka, ditambah dengan berbagai instrumen lainnya yang datang menyusul, telah memperkaya umat manusia tentang HAM dan menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabaikan.

### Hak Asasi Manusia Di Dunia Islam

Ann Elizabeth Mayer benar ketika mengatakan bahwa "di kalangan muslim sendiri terjadi pertentangan pendapat yang tajam mengenai perlindungan HAM macam apakah yang diberikan Islam." Dan bahwa setiap kali "pemerintah menggunakan kriteria Islam, maka tujuannya adalah untuk membatasi pelaksanaan HAM."<sup>30</sup> Di samping sangat kurangnya komitmen kepada HAM, para pemerintah muslim di seluruh dunia hampir selalu meratifikasi kovenan-kovenan HAM internasional, dan para ahli hukum dan ilmuwan muslim "lekas menyatakan bahwa Islam selalu mendukung HAM."<sup>31</sup>

Merefleksikan ketidaktegasan yang menandai dunia Islam, banyak kaum muslim secara instinktif merasa bahwa "jika anda pikir itu berharga, maka kami sudah memilikinya sejak dulu." Inilah deklarasi seminar mengenai HAM dalam Islam di Universitas Kuwait pada 1980. "Islam adalah yang pertama mengakui HAM dan hampir empat belas abad yang lalu Islam memberikan jaminan dan perlindungan yang baru akhir-akhir ini saja dimasukkan dalam deklarasi universal HAM."<sup>32</sup>

Memang kita tidak hanya selalu mengklaim bahwa kita sudah lama memilikinya sebelum yang lain tetapi, kita juga mengklaim, milik kita lebih unggul dari pada yang lain. Demikianlah, seminar tersebut menyatakan keyakinan Islam bahwa HAM merupakan pemberian Tuhan dan bukan sesuatu yang sifatnya melekat pada kodrat Tuhan yang menganugerahkan kepada mereka (HAM) suatu

---

<sup>29</sup>Ide awal generasi III muncul dalam Piagam Afrika mengenai hak-hak rakyat dan manusia (*The African Charter of Human and People Rights*) sebagai paradigma alternatif terhadap konsep dan implementasi kebijaksanaan pembangunan yang secara eksplisit mengabaikan hak-hak rakyat yang paling fundamental. Lihat tulisan Theo C. Van Boven, Director of the United Nations Division of Human Rights, tentang *The rights to Development and Human Rights*, sebuah presentase yang diajukan pada suatu pembukaan seminar NOVIB di Utrecht, 1980.

<sup>30</sup>Ann Elizabeth Mayer, "The Dilemma of Islamic Identity," dalam Leroy S. Rouner (ed) *Human Rights and the World's Religions* (Notre Dame, Ind: University of Notre Dame, 1988), 94.

<sup>31</sup>Robert Traer, *Faith in Human Rights: Support in Religious Traditions for Global Struggle* (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1990), 111.

<sup>32</sup>*Human Rights in Islam* (Geneva: International Commission of jurist, 1982), 3.

cara pemuliaan, penghormatan dan penyucian tambahan untuk melindungi mereka dan serangan para penguasa, memberikan kepada mereka kualitas-kualitas kesempumaan dan universalitas serta membuatriya tidak dapat diasingkan dan ditiadakan.<sup>33</sup>

Terlepas dari apologia kaum muslim dan rangsangan yang ditimbulkan berbagai perjuangan HAM di dunia muslim--yang berdasarkan pandangan sekuler maupun teologis, Fouad Zakaria tepat ketika mengajukan ringkasan mengenai pandangan muslim tentang HAM berikut ini:

Konsep ini bersifat teosentrik. Di dalamnya manusia dinilai hanya sejauh dia merupakan refleksi dari hakekat ilahiyah. Ia bersifat non-historis, atau lebih tepatnya ia membekukan momen sejarah tertentu dan berpegang erat kepadanya selamanya, sehingga terlepas dari mobilitas dinamisme dan perkembangan sejarah. Akhirnya, ia bersifat non-empirik. Ia tidak tergantung kepada praktek yang berlangsung lama dan berangsur-angsur dalam perluasan lingkup HAM tetapi berusaha meniru cita-cita teoritis dan spiritual sembari sepenuhnya tidak mempedulikan efek praktek tersebut terhadap cita-cita teoritis ini.<sup>34</sup>

Perjumpaan antara Islam dan wacana HAM di kebanyakan dunia Islam sekarang ini jelas merupakan akibat dari perjumpaan dunia Islam dengan modernitas dan Barat. Dua respons terhadap dimensi perjumpaan ini merupakan bukti di dunia muslim sekarang: *Pertama*, respons pembelaan diri dari kaum tradisional yang telah "memasukkan berbagai tema, terminologi dan makna yang berkaitan dengan konsep ini ke dalam kosa kata Islam di dalam berbagai deklarasi HAM," tanpa menghiraukan semangatnya. *Kedua*, setelah menerima HAM sebagai sebuah prinsip dan muatan nilai, kaum muslim progresif mencari suatu dasar untuk melegitimasi concern mereka atas dasar Islam atau mengaktualisasikan concern tersebut dalam sebuah komunitas yang sangat menyatu dengan tradisi Islam.

Dalam kosa kata Arab ada kata *haqq*, yang diterjemahkan secara tepat sebagai "hak" (*right*) dan hak asasi manusia Yang disebut dengan *huqûq al-Insan*. Benar bahwa istilah ini dan formulasinya baru populer di masyarakat Islam sejak awal abad ini. Hal ini karena ajaran-ajaran agama umumnya lebih menekankan kewajiban ketimbang hak. Hak-hak akan dicapai jika individu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Namun ulama klasik telah menformulasikan istilah *al-umûr al-darûriyyah* (kebutuhan manusia) dan *al-umûr al-hâjiyyah* (kepentingan manusia), yang harus dipenuhi dan dipertahankan dalam kehidupan manusia. Istilah-istilah ini serupa dengan konsep tentang hak asasi manusia dewasa ini. Oleh karena itu, perkataan Alasdair MacIntyre bahwa gagasan tentang hak tidak dapat ditemukan dalam setiap masyarakat, yang didukung oleh kenyataan tidak adanya pernyataan dalam bahasa zaman kuno atau zaman pertengahan yang secara tepat dapat

---

<sup>33</sup>Ibid., 11.

<sup>34</sup>Traer, *Faith in Human Rights*, 113.

cara pemuliaan, penghormatan dan penyucian tambahan untuk melindungi mereka dan serangan para penguasa, memberikan kepada mereka kualitas-kualitas kesempumaan dan universalitas serta membuatriya tidak dapat diasingkan dan ditiadakan.<sup>33</sup>

Terlepas dari apologia kaum muslim dan rangsangan yang ditimbulkan berbagai perjuangan HAM di dunia muslim--yang berdasarkan pandangan sekuler maupun teologis, Fouad Zakaria tepat ketika mengajukan ringkasan mengenai pandangan muslim tentang HAM berikut ini:

Konsep ini bersifat teosentrik. Di dalamnya manusia dinilai hanya sejauh dia merupakan refleksi dari hakekat ilahiyah. Ia bersifat non-historis, atau lebih tepatnya ia membekukan momen sejarah tertentu dan berpegang erat kepadanya selamanya, sehingga terlepas dari mobilitas dinamisme dan perkembangan sejarah. Akhirnya, ia bersifat non-empirik. Ia tidak tergantung kepada praktek yang berlangsung lama dan berangsur-angsur dalam perluasan lingkup HAM tetapi berusaha meniru cita-cita teoritis dan spiritual sembari sepenuhnya tidak mempedulikan efek praktek tersebut terhadap cita-cita teoritis ini.<sup>34</sup>

Perjumpaan antara Islam dan wacana HAM di kebanyakan dunia Islam sekarang ini jelas merupakan akibat dari perjumpaan dunia Islam dengan modernitas dan Barat. Dua respons terhadap dimensi perjumpaan ini merupakan bukti di dunia muslim sekarang: *Pertama*, respons pembelaan diri dari kaum tradisional yang telah "memasukkan berbagai tema, terminologi dan makna yang berkaitan dengan konsep ini ke dalam kosa kata Islam di dalam berbagai deklarasi HAM," tanpa menghiraukan semangatnya. *Kedua*, setelah menerima HAM sebagai sebuah prinsip dan muatan nilai, kaum muslim progresif mencari suatu dasar untuk melegitimasi concern mereka atas dasar Islam atau mengaktualisasikan concern tersebut dalam sebuah komunitas yang sangat menyatu dengan tradisi Islam.

Dalam kosa kata Arab ada kata *haqq*, yang diterjemahkan secara tepat sebagai "hak" (*right*) dan hak asasi manusia Yang disebut dengan *huqûq al-Insan*. Benar bahwa istilah ini dan formulasinya baru populer di masyarakat Islam sejak awal abad ini. Hal ini karena ajaran-ajaran agama umumnya lebih menekankan kewajiban ketimbang hak. Hak-hak akan dicapai jika individu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Namun ulama klasik telah menformulasikan istilah *al-umûr al-darûriyyah* (kebutuhan manusia) dan *al-umûr al-hâjiyyah* (kepentingan manusia), yang harus dipenuhi dan dipertahankan dalam kehidupan manusia. Istilah-istilah ini serupa dengan konsep tentang hak asasi manusia dewasa ini. Oleh karena itu, perkataan Alasdair MacIntyre bahwa gagasan tentang hak tidak dapat ditemukan dalam setiap masyarakat, yang didukung oleh kenyataan tidak adanya pernyataan dalam bahasa zaman kuno atau zaman pertengahan yang secara tepat dapat

---

<sup>33</sup>Ibid., 11.

<sup>34</sup>Traer, *Faith in Human Rights*, 113.

diterjemahkan dengan pernyataan "hak" hingga hampir akhir abad pertengahan, tidak dapat diterima. Formulasi hak asasi menurut Islam didefinisikan dalam *Cairo Declaration on Human Right in Islam* yang dideklarasikan tanggal 15 Agustus 1990 di Kairo. Deklarasi ini dapat disetujui oleh anggota-anggota OIC setelah negosiasi panjang selama tiga belas tahun. Deklarasi itu terdiri dari 25 pasal, yang meliputi hak-hak individual, sosial, ekonomi, dan politik. Seluruh hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subyek syariat Islam (pasal 24), yang secara tepat disebutkan sebagai satu-satunya sumber rujukan untuk menjelaskan atau klarifikasi setiap pasal dalam deklarasi (pasal 25).

### Perbedaan Perspektif : Islam Vs Barat

Ibn Khaldūn dalam bukunya "*Muqaddimah*" menyebutkan, bahwa Islam mempercayai harkat dan martabat manusia yang tinggi itu bukan sesuatu yang dimiliki atau tertanam dalam dirinya (*inherent*).<sup>35</sup> Manusia diciptakan dari tanah, kemudian dari "air yang hina".<sup>36</sup> Harkat dan martabat yang tinggi itu hanya diperoleh melalui nikmat Allah SWT, karena perannya sebagai wakil Allah di atas bumi-Nya. Karenanya, manusia dengan penuh kesadaran memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memelihara alam semesta ini, sesuai dengan petunjuk-Nya.

Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk mengikuti bimbingan Yang Mahakuasa selama hidupnya. Seluruh bumi ini, menurut agama Islam, merupakan masjid tempat manusia harus bertindak dalam setiap aspek kehidupannya demi mengabdikan/beribadah (*ibādah*) hanya kepada-Nya.<sup>37</sup> Tujuan eksistensi manusia di dunia, menurut Islam adalah semata-mata untuk beribadah, menghambakan diri, serta patuh kepada Allah SWT. Dari pernyataan ini, memang banyak yang mengatakan bahwa "manusia (dalam Islam) tidak memiliki hak-hak selain hanya kewajiban-kewajiban." Dalam penelitiannya, A. K. Brohi mengatakan, "Dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Allah mencakup juga kewajibannya kepada setiap individu yang lain. Maka secara paradoks hak-hak setiap individu itu dilindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum ilahi. Sebagaimana suatu negara secara bersama-sama dengan rakyat harus tunduk kepada hukum, yang berarti negara juga harus melindungi hak-hak individual."<sup>38</sup>

Pada umumnya, orang berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk terpenting di alam semesta ini. Karenanya, melekat pada dirinya martabat dan harga diri (*karamah, human dignity*). Martabat dan harga diri itu telah tertanam (*inherent*) pada dirinya sejak semula. Itu tampak dari pidiran orang tentang hak asasi yang biasanya dipahami sebagai: "hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya

<sup>35</sup>Sebagaimana dikutip dalam A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldūn* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 34.

<sup>36</sup>Lihat Q.S. al-Sajdah ayat 7-8

<sup>37</sup>Lihat Q.S. al-'An'ām/6: 62-63

<sup>38</sup>Sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Syekh Syaukar Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, pen. Abdul Rachim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 53-54.

bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat.” Bahkan tampaknya pemikiran seperti inilah yang sangat mempengaruhi konsep Barat mengenai HAM.

Sebagaimana telah di jelaskan di atas, dalam Islam, manusia memiliki apa yang disebut suatu kewajiban ganda yang harus ditunaikan: *pertama*, yang berhubungan dengan dirinya, yang disebut *huqûq Allah* atau hak-hak Tuhan, dan *kedua*, yang berkaitan dengan dunia eksternal, yang disebut *huqûq al-`ibâd*, yang terakhir ini disebut juga sebagai hak-hak masyarakat dalam dunia eksternal dari penciptaan. Tetapi jika orang beragama memikirkan secara mendalam, dikhotomi semacam ini akan hilang. Hilangnya dikhotomi ini beralasan, karena hak-hak Tuhan terdapat di mana pun mereka berada dan mencakup semuanya; *huqûq al-`ibâd* atau *huqûq al-nâs* kelihatan terus mengalir dari kewajiban yang harus ditunaikan seseorang yang beriman kepada Tuhan, sejauh ia tak hanya mengakui-Nya sebagai Penciptanya, tetapi juga mengakui-Nya sebagai Pencipta seluruh alam. Dan tentu saja dunia eksternal tunduk kepada hukum-Nya. Kategori di atas mencakup kewajiban seperti salat, kebutuhan untuk membersihkan badan dan pikiran, dan kemudian kewajiban yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, seperti halnya antara manusia dan negara.

Menurut Al-Maududi, hak-hak yang diberikan oleh raja atau presiden suatu ketika akan dapat ditarik lagi dengan mudah seperti layaknya ketika hak tersebut diberikan. Oleh karena itu, lanjut Al-Maududi, kewenangan memberikan hak-hak tersebut di tangan Allah SWT. Tidak mungkin satu golongan atau kelompok yang berkuasa ditingkat internasional sekalipun memaksakan kehendaknya untuk mengamandemen atau membatalkan kewenangan Tuhan tersebut.<sup>39</sup>

Pada aspek inilah, terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dengan konsep HAM Barat seperti yang ada dalam masyarakat internasional. HAM, dalam pandangan Islam, dikategorisasikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Sedangkan bagi Barat, HAM ditentukan oleh aturan-aturan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan semesta alam.

Selain itu, perbedaan juga terdapat dalam cara memandang HAM itu sendiri. Islam, menurut pandangan yang sifatnya *teosentris*, mengandung aspek ketuhanan dan manusia hidup dimaksudkan untuk mengabdikan kepada-Nya. Karenanya, nilai-nilai yang selama ini dikenal di dunia internasional, termasuk yang dianggap dari Barat sekalipun (demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan sebagainya), diperuntukkan bagi tegaknya HAM yang berorientasikan pada penghargaan manusia.

Sebaliknya di Barat, ukuran sesuatu mesti diselaraskan dengan keberadaan manusia, sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan individu-individu semata. Pemahaman inilah yang kemudian dikenal dengan

---

<sup>39</sup>Maulana Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksar, 1995), 1993.



anthrophosentrisme. Ukuran ini berbeda dengan Islam dimana HAM dijiwai oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Quran sebagai transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintah untuk hidup dan bekerja sesuai dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap Allah SWT.

Dengan pemaknaan yang lebih dalam, Alwi Shihab memaknai HAM yang berkembang di Barat telah menempatkan manusia dalam setting yang terpisah dengan Tuhan (*devided God*). HAM merupakan hak yang secara alamiah akan diperoleh seseorang sejak lahir. Perbedaan persepsi tentang manusia, hak-haknya, hingga nasibnya merupakan salah satu sebab yang memicu konflik antara Dunia Barat dengan Timur, dalam hal ini Islam. Menurut Islam, tambah Alwi, HAM merupakan anugerah Tuhan, sehingga setiap individu harus bertanggung jawab kepada Tuhan.<sup>40</sup>

Perlu ditegaskan bahwa antara Barat dan Islam terdapat perbedaan, yang pertama manganut sekularisme (pemisahan antara diri manusia dengan Tuhannya), sedangkan yang kedua menjunjung tinggi otoritas ketuhanan. Jelasnya, di Barat, HAM hanya dipertanggungjawabkan pada sesama manusia saja.

Dalam prakteknya, HAM yang diajukan Barat benar-benar telah menghegemoni dunia selain Barat. Proses hegemoni ini melalui penguasaan global oleh Barat, mulai dari kekuasaan ekonomi, politik, budaya hingga media komunikasi internasional. Dengan cara itu, bagaimana sulitnya negara-negara selain Barat untuk lepas dari pengaruh dunia Barat.

Dengan keempat bidang garapan tersebut, wacana HAM yang dikenal di Barat sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat di luar Barat tentang HAM. Islam, misalnya, melihat pengaruh Barat yang *antrophosentris* itu harus segera dihentikan dengan memberikan suatu tawaran wacana bahwa HAM adalah interpretatif. Dari aspek inilah Islam menjelaskan bahwa HAM bukan sekadar masalah kemanusiaan saja, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan ketuhanan (*teosentris*).

### **Menggagas Hak Asasi Manusia Universal**

Sebenarnya, secara teoretis, telah digambarkan oleh para filosof Yunani Kuno, seperti Aristoteles yang mencetuskan ide kolektivistik, ataupun Epicurus yang menyerukan gagasan masyarakat individual. Munculnya ketegangan pemenuhan hak individu dengan hak kolektif sebenarnya dikarenakan oleh hegemoni wacana Internasional dimana di satu pihak, Barat berdasar Deklarasi HAM Universalnya, mengklaim lebih apresiatif terhadap HAM secara individual dan di pihak lain, kelompok Islam, negara berkembang, dan budaya lainnya mengevaluasinya bahwa HAM universal telah mengabaikan hak-hak kolektif bermasyarakat.

Pemisahan individu dari masyarakat di abad pertengahan juga telah

---

<sup>40</sup> Sujana, *HAM dalam Perspektif*, 13.

disinggung oleh para pemikir filsafat politik, Thomas Hobbes dan John Locke, misalnya, hubungan individu dan negara harus menjadi fokus utama. Hal yang sama juga pernah diutarakan oleh Thomas Jefferson maupun naskah Revolusi Prancis, bahwa perlu ada penataan kembali terhadap hak-hak individu ketika adanya kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya. Meski dalam kategori positif, penggunaan istilah individu bukan warga negara dalam kewajibannya terhadap negara menjadi bukti awal telah mulai ada upaya-upaya membagi warga negara ke dalam individu, kelompok, dan penguasa.

Dewasa ini, pertentangan terus berlanjut hingga mulai upaya untuk saling mempertemukan dua karakter yang berbeda tersebut, sehingga timbul kesadaran bahwa seseorang dapat dipandang sebagai individu, tetapi di sisi lain dikenal dengan anggota kelompok masyarakat. Sebagai individu, ia memiliki kepentingan-kepentingan tertentu (hak) dan sebagai anggota masyarakat juga memiliki kaitan-kaitan tertentu pula (kewajiban). Keduanya sulit untuk dipisahkan, bahkan pada suatu ketika seseorang akan mempunyai hak dan kewajiban secara bersamaan.<sup>41</sup>

Kemudian dari sudut pandang yang agak berbeda, untuk menghadapi wacana hegemoni internasional, bahwa nilai budaya lokal negara-negara berkembang dapat digali untuk mendukung pemahaman HAM. Persoalannya, bagaimana cara mengangkat dan menyesuakannya dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, nilai-nilai asasi yang dimiliki oleh setiap bangsa perlu dikaji sebagai landasan utama di dalam mengambil keputusan, sehingga tidak adanya kesan pemaksaan atas satu entitas HAM tertentu, dalam hal ini HAM Universal atas pemahaman yang lain.

Hingga dekade 1970-an, ketegangan ini terus berlanjut sampai adanya upaya penyelesaian kompromistis bahwa individu dan masyarakat adalah entitas terpenting dalam menegakkan HAM secara menyeluruh. Hak individu bila diabaikan, akan merembet pada hak-hak orang lain yang juga merupakan bagian masyarakat. Begitu juga dengan hak masyarakat, bila kolektivitas diabaikan, secara otomatis, ada hak-hak individu yang berkurang.

Oleh karena itu, untuk mencairkan pertentangan antar kedua pandangan tersebut, budaya keterbukaan layak dikembangkan, selain mengembangkan pendidikan politik yang benar-benar merepresentasikan kampanye HAM secara menyeluruh; tidak *bias* Barat maupun kelompok-kelompok yang bertentangan dengannya. Keterbukaan akan menumbuhkan saling percaya antar pihak. Sebaliknya, sikap tertutup akan membawa saling curiga.

### Kesimpulan

Diskursus HAM masih terus diperdebatkan. Perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dengan konsep HAM Barat. Islam, menurut pandangan yang sifatnya *teosentris*, mengandung aspek ketuhanan dan manusia hidup

---

<sup>41</sup>Deliar Nur, Jawa Pos, 15/3/1991.

dimaksudkan untuk mengabdikan kepada-Nya. Sebaliknya di Barat, ukuran sesuatu mesti diselaraskan dengan keberadaan manusia, sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan individu-individu semata (*anthroposentris*). Perbedaan persepsi tentang manusia, hak-haknya, hingga nasibnya merupakan salah satu sebab yang memicu konflik antara dunia Barat dan Islam. Islam melihat pengaruh Barat itu harus segera dihentikan dengan memberikan suatu tawaran wacana bahwa HAM adalah interpretatif.

Untuk mencairkan pertentangan antar kedua pandangan tersebut, budaya keterbukaan layak dikembangkan. Nilai-nilai asasi yang dimiliki oleh setiap bangsa perlu dikaji sebagai landasan utama di dalam mengambil keputusan, sehingga tidak adanya kesan pemaksaan atas satu entitas HAM tertentu, dalam hal ini HAM Universal atas pemahaman yang lain. Selain itu, perlu dikembangkan pendidikan politik yang benar-benar merepresentasikan kampanye HAM secara menyeluruh; tidak *bias* Barat maupun kelompok-kelompok yang bertentangan dengannya.

### Daftar Pustaka

- Budiarjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000).
- Cranston, Maurice. *Human Rights Today* (Bombay: Manaktana & Sons, 1962).
- Herman, Beny. "Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar", dalam Paul S. Baut dan Benny Herman, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan LBHI, 1988)
- [http://www.leftjustified.Org/leftjust/lib/sc/ht/decl/home\\_map](http://www.leftjustified.Org/leftjust/lib/sc/ht/decl/home_map)
- <http://www.udhr50.org/history/overview.html>
- <http://education.Yahoo.com/reference/encyclopedia/Index.html>
- [http://www.france\\*nobel-online.com](http://www.france*nobel-online.com)
- <http://www.udhr50.org/history/overview.html>
- Hussain, Syekh Syaikat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, pen. Abdul Rachim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Jawa Pos, 15/3/1991.
- Jurnal Magister Hukum Vol. II No. 1 Pebruari 2000
- Lopa, Baharuddin. *al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1999)
- Mahmood, Tahir. (ed). *Human Rights in Islamic Law* (New Delhi: Genuine Publications Pvt. Ltd., 1993)
- Maududi, Maulana Abul A'la. *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Mayer, Ann Elizabeth. "The Dilemma of Islamic Identity", dalam Leroy S. Rouner (ed) *Human Rights and the World's Religions* (Notre Dame, Ind: University of Notre Dame, 1988)
- Setiardja, A. Gunawan. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Sieghart, Paul. *The International Law of Human Rights* (Oxford: Clarndon Press, 1984)
- Sujana, Eggi. *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki* (Jakarta: Nuansa Madani, 2000)
- The Encyclopedia Americana: International Edition*, New York: Americana Cooperation, 1972
- Traer, Robert. *Faith in Human Rights: Support in Religious Traditions for Global Struggle* (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1990).
- Widjaja, H. A. W. *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia* (Jakarta: Rineka

### Daftar Pustaka

- Budiarjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000).
- Cranston, Maurice. *Human Rights Today* (Bombay: Manaktana & Sons, 1962).
- Herman, Beny. "Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar", dalam Paul S. Baut dan Benny Herman, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan LBHI, 1988)
- <http://www.leftjustified.Org/leftjust/lib/sc/ht/decl/home.map>
- <http://www.udhr50.org/history/overview.html>
- <http://education.Yahoo.com/reference/encyclopedia/Index.html>
- [http://www.france\\*nobel-online.com](http://www.france*nobel-online.com)
- <http://www.udhr50.org/history/overview.html>
- Hussain, Syekh Syaikat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, pen. Abdul Rachim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Jawa Pos, 15/3/1991.
- Jurnal Magister Hukum Vol. II No. 1 Pebruari 2000
- Lopa, Baharuddin. *al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1999)
- Mahmood, Tahir. (ed). *Human Rights in Islamic Law* (New Delhi: Genuine Publications Pvt. Ltd., 1993)
- Maududi, Maulana Abul A'la. *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Mayer, Ann Elizabeth. "The Dilemma of Islamic Identity", dalam Leroy S. Rouner (ed) *Human Rights and the World's Religions* (Notre Dame, Ind: University of Notre Dame, 1988)
- Setiardja, A. Gunawan. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Sieghart, Paul. *The International Law of Human Rights* (Oxford: Clarndon Press, 1984)
- Sujana, Eggi. *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki* (Jakarta: Nuansa Madani, 2000)
- The Encyclopedia Americana: International Edition*, New York: Americana Cooperation, 1972
- Traer, Robert. *Faith in Human Rights: Support in Religious Traditions for Global Struggle* (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1990).
- Widjaja, H. A. W. *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia* (Jakarta: Rineka



Cipta, 2000).

Zainuddin, A. Rahman. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldūn* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)

**al-'Adâlah** merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun, setiap bulan Juni dan Desember. Diterbitkan oleh STAIN Jember Press, dimaksudkan sebagai wahana pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, agamawan, intelektual, dan mahasiswa) dengan keislaman dan kemasyarakatan sebagai ranah kajian

---

Alamat Redaksi  
Jl. Jumat 94 Mangli Jember  
Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 427005  
e-mail: aulann@yahoo.co.id

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember



**LEMBAR  
 HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
 KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul karya ilmiah (artikel) : Universalitas Hak Asasi Manusia: Antara Teosentris dan Antroposentris,  
 Jumlah Penulis : 1 Orang  
 Status Pengusul : Penulis Pertama  
 Dr. Muhammad Akmansyah, M.A.  
 a. Nama Jurnal : Al-Adalah  
 b. Nomor ISSN : 1410-7405  
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : 13; 2; Desember 2010  
 d. Penerbit : STAIN Jember Press  
 e. DOI artikel (jika ada) : -  
 f. Terindeks di : -  
 g. Halaman : 297-310 (14 halaman)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional/Internasional Bereputasi  
 ( beri ✓ pada kategori yang tepat) ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
☒ Jurnal Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :


Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir yang diperoleh
	Internasional/Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			8	0,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			26	2,6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan Metodologi (30%)			26	2,6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)			25	2,5
<b>Total = (100 %)</b>			<b>85</b>	
<b>Nilai Pengusul</b>				<b>8,5</b>

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer:

Artikel ini membahas universalitas HAM antara teosentris dan antroposentris. Penulis membahas Islam antara antroposentris dan teosentris. Bagaimana Islam yang berbudutikan dari Allah, alhamdulillah. Artikel ini penting untuk penelitian penelitian Islam dan Islam.

Bandar Lampung, 21 April 2017

Reviewer 1,

  
**Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A.**  
 NIP. 195606111908031001  
 Unit Kerja: UIN Raden Intan Lampung



**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul karya ilmiah (artikel) : Universalitas Hak Asasi Manusia: Antara Teosentris dan Antroposentris.  
 Jumlah Penulis : 1 Orang  
 Status Pengusul : Penulis Pertama  
 Dr. Muhammad Akmansyah, M.A.  
 a. Nama Jurnal : Al-Adalah  
 b. Nomor ISSN : 1410-7406  
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : 13; 2; Desember 2010  
 d. Penerbit : STAIN Jember Press  
 e. DOI artikel (jika ada) : -  
 f. Terindeks di : -  
 g. Halaman : 287-310 (14 halaman)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional/Internasional Bereputasi  
 ( beri ✓ pada kategori yang tepat) ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
☒ Jurnal Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir yang diperoleh
	Internasional/Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			8	0,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			27	2,7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan Metodologi (30%)			27	2,7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)			26	2,6
<b>Total = (100 %)</b>			<b>86</b>	
<b>Nilai Pengusul</b>				<b>8,8</b>

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer.

Islam memiliki ide & praktik HAM yg berbeda dg Dunia Barat.  
 Artikel ini th berusaha memberikan deskripsi ttg HAM dlm perspektif Islam yg bersifat teosentris serta informasi yg cukup penting terkait perkembangan pemikiran & penerapan HAM d. Dunia Islam.

Bandar Lampung, 21 April 2017

Reviewer 2.

Dr. Hj. Siti Palimah, M.Pd.

NIP. 197211211998032007

Unit Kerja: UIN Raden Intan Lampung